

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BARENG 2024



CAMAT BARENG
USMAN, SE., M.Si



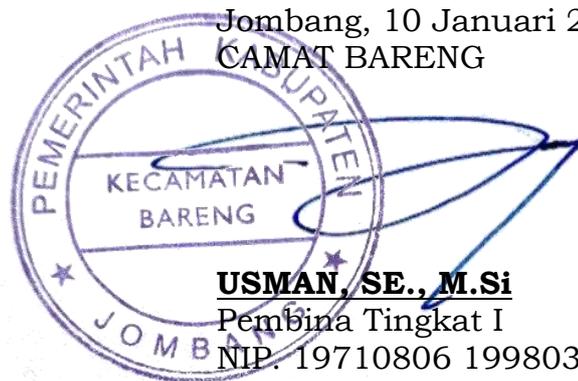
KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, marilah kita bersama-sama terus menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing demi kepentingan negara, nusa, dan bangsa yang kita cintai.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bareng Tahun Anggaran 2024. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat informasi mengenai pencapaian sasaran, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Jombang, 10 Januari 2025
CAMAT BARENG



USMAN, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bareng sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Bareng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Bareng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

1. 1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang, Tugas dan Fungsi, Peta Proses Bisnis serta penyajian data strategis organisasi meliputi cascading kinerja yang menjelaskan terkait penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan Isu Strategis. terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Bareng dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;

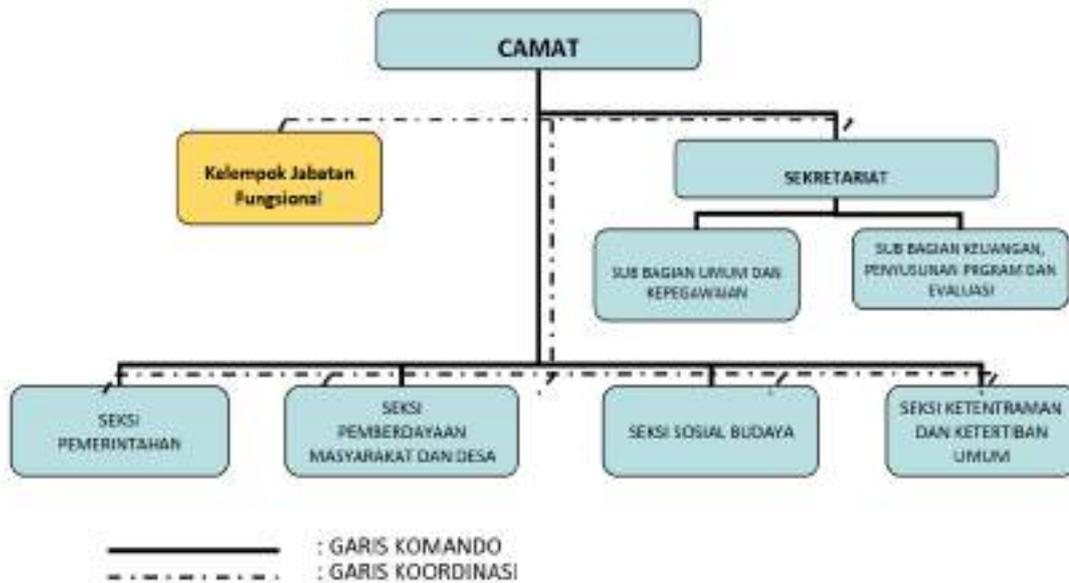
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Gambar 1. 1: Struktur Organisasi Kecamatan Bareng



Sumber Data:

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bareng juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Bareng merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Bareng menjadikan kebutuhan Kecamatan Bareng belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Bareng masih terbatas;

4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1. 4 Cascading Kinerja

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada tujuan RPD

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terkait dengan tujuan RPD yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.. Indikator tujuan RPD adalah Indeks Good Governance (IGG).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang adalah :

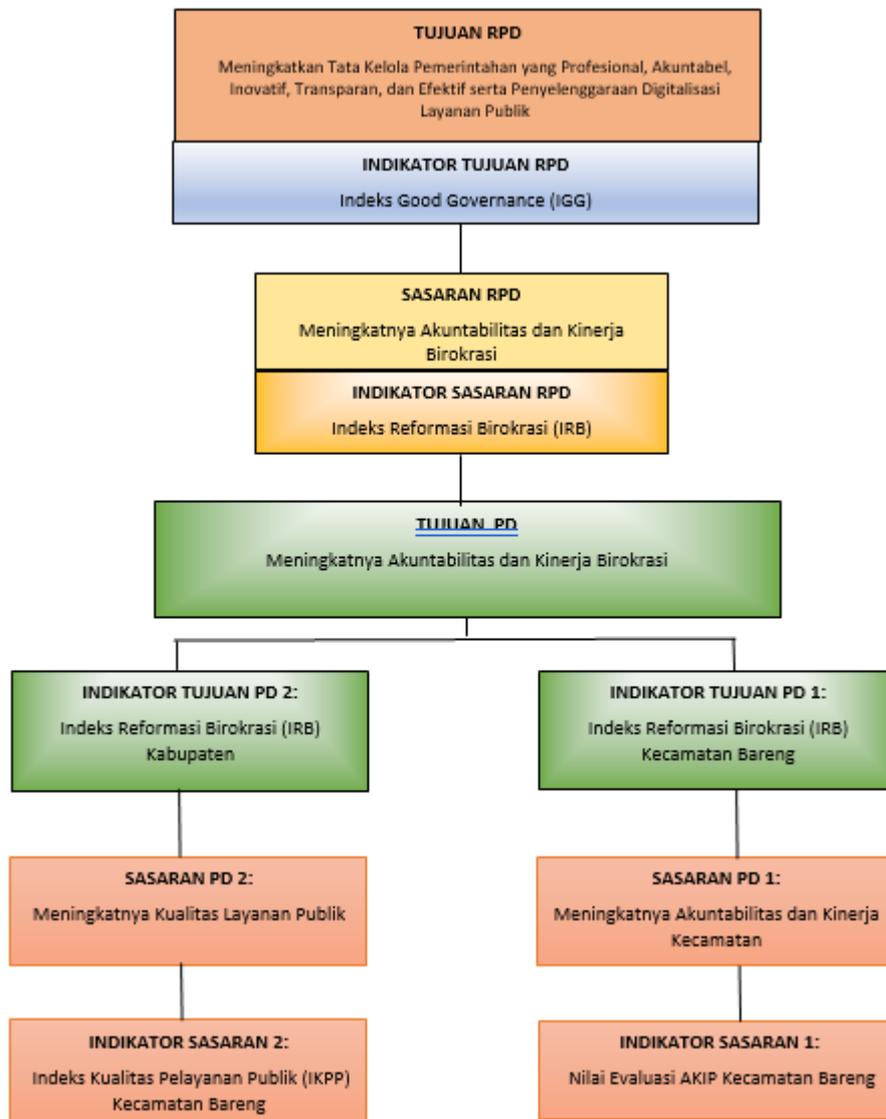
1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik

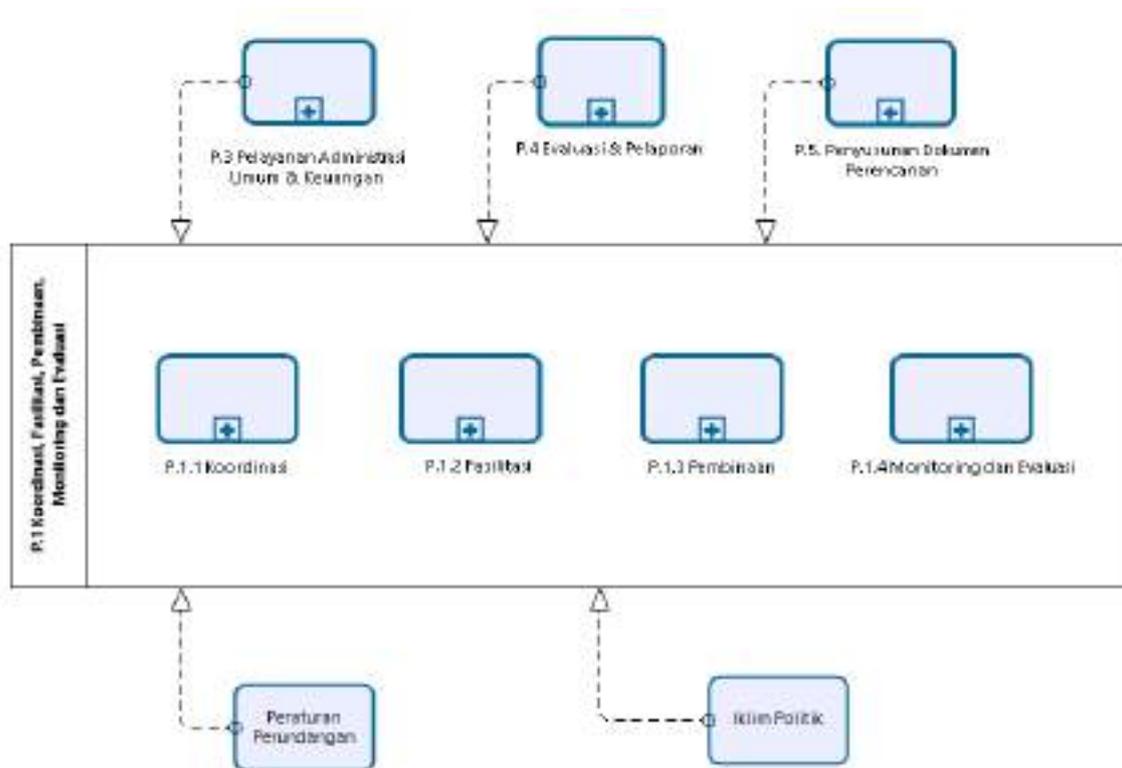
Adapun keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Gambar 1. 2: Cascading Kecamatan Bareng



1. 5 Peta Proses Bisnis

Gambar 1. 3: Peta Proses Bisnis Kecamatan Bareng



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1. 6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi yang diperoleh Kecamatan Bareng selama tahun 2024 terdiri dari:

1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Bareng

2. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Bareng

1.6.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Bareng

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/568/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bareng Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 adalah 73,59 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1. 2 : Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Bareng

NO	KOMPONEN	BOBOT	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% CAPAIAN (BOBOT)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	13,46	24,25	88,00
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,82	15,00	22,02	81,62
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,18	13,91	8,53	92,33
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,75	-	18,75	74,63
TOTAL		100%			73,59	

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Bareng. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Bareng Kabupaten Jombang, agar :

1. Membuat dokumen Berita Acara Penetapan Target Kecamatan Bareng yang memuat perubahan taeget tahun 2024 dilengkapi dengan perubahan target pada DPA.
2. Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut dari capaian Target jangka menengah dalam Renstra yang telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Menambahkan klasifikasi predikat pada SK reward dan punishment sebagai dasar penilaian kinerja dan capaian / target kinerja sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tecapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan.
4. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja berupa upaya nyata atas rekomendasi tindaklanjut yang ada sehingga terdapat

kesinambungan atas hasil rekomendasi tindaklanjut laporan kinerja dengan perencanaan kinerja tahun selanjutnya.

5. Memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan pada Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi dengan capaian nasional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang

tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bareng pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Subkegiatan:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 : Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja 2024

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2024	Target Perubahan Renja 2024	Bertambah/ (Berkurang)
		K	K	K
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	-
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	-
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	-
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Org/bln	16 Org/bln	-
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22 Paket	22 Paket	-
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	-

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2024	Target Perubahan Renja 2024	Bertambah/ (Berkurang)
		K	K	K
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	-
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan gedung kantor /bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	58 unit	51 unit
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	-
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	-
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	-
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	-
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	-
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13 unit	-
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	94,75	-
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	-
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	-
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	-
Kegiatan:	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev	5 laporan	5 laporan	-

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2024	Target Perubahan Renja 2024	Bertambah/ (Berkurang)
		K	K	K
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	sosial budaya yang dilaksanakan			
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	-
Sub Kegiatan 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	-
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	-
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait dengan instansi terkait	100%	100%	-
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	-
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	-
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	-
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	-
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	-
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	-
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	-
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	-
Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakan	78 lembaga kemasyarakan	-
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	-

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Bareng atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kecamatan Bareng Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Bareng untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BARENG TAHUN 2024

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30

2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05
----	--------------------------------------	--	------

N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.717.989.953
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Bareng	94,75	6.544.350
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	72.664.350
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	28.348.050
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	15.848.200
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	35.490.700
					2,580,595,912

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bareng dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Bareng
		<p>Definisi Operasional : Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>		
2	Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil survey IKM dan IPP Kecamatan Bareng
		<p>Definisi Operasional : Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik</p>		

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai
2.	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Bareng Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
3.	Terlaksananya PHBN / PHBA dan monev sosial budaya sesuai aturan	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan PHBN / PHBA dan monev sosial budaya
4.	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam tepat waktu	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam}} \times 100\%$	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Forkopimcam
5.	Terlaksananya tindaklanjut kasus pelanggaran perda/ perkada dan trantibum oleh instansi terkait tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait}}{\text{Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100\%$	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
6.	Terlaksananya koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
7.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	<p>Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</p> <p>-----x100%</p> <p>Jumlah Desa</p>	Dokumen RKPDesa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Bareng telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 Jumlah pegawai
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah tahun n
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun n
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
6			2. Persentase laporan keuangan yang	100%	Jumlah laporan keuangan yang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
			tersusun sesuai aturan		tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
7	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
8	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD tahun n
9	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah tahun n
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang direncanakan tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	22 paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut
10	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi tahun n -----x100 Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran tahun n

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
11	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	9 paket	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
12	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
13	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n
14	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan tahun n
15	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan tahun n
16	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
17	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang direncanakan tahun n
18	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
19	Kegiatan: Penyediaan Jasa	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Persentase pemenuhan jasa	100%	Jumlah pemenuhan jasa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah		penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
20	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n
21	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
22	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
23	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
24	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	Jumlah gedung kantor/ bangunan pendukung yang terpelihara tahun n
25	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara tahun n

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
26	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	Nilai PATEN Kecamatan Bareng Tahun n
27	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan yang terselesaikan sesuai standar pelayanan (PATEN) -----x100 Jumlah Pelayanan yang terselesaikan
28	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tahun n
29	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya -----x100% Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan
30			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam
31	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA dan Monev Sosial Budaya tahun n
32			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
					Forkopimcam tahun n
33	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa tahun n
34	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan tahun n
35	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada
36	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
37	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
		Republik Indonesia			
38	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa -----X100% Jumlah Desa
40	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	Jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan Lengkap tahun n
41	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Perintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 laporan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa tahun n
42	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif -----x100% Jumlah Desa
44	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	Jumlah Lembaga /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
45	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	4 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk kewajiban bagi suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian maupun kendala dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui sistem pelaporan secara periodik. Sebagai SKPD yang mengemban misi organisasi, Kecamatan Bareng menjalankan kewajiban ini dengan menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan laporan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 mengenai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh melalui evaluasi terhadap indikator kinerja yang terkait dengan sasaran strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung capaian rata-rata dari seluruh indikator kinerja sasaran, sehingga memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan organisasi

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal, yang disajikan sebagai berikut:

NO.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	>110% - 120%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% - 110%	: Baik (Berhasil)
3	>70% - 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50% - 70%	: Kurang
5	0% - 50%	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja didasarkan pada persentase capaian indikator kinerja sasaran, dengan ketentuan bahwa capaian yang melebihi 100% tetap dinilai sebagai 100%, sementara capaian yang kurang dari 0% ditetapkan sebagai 0%. Setelah itu, hasil evaluasi kinerja dianalisis guna memberikan pemahaman yang lebih transparan terkait faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari pencapaian yang sesuai maupun yang belum memenuhi target, sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan strategi dan pengambilan keputusan ke depan.

Laporan ini menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kegiatan di Kecamatan Bareng berdasarkan evaluasi terhadap masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Selain itu, laporan ini juga menilai tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 serta Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024. Dengan pendekatan ini, laporan memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan strategis yang telah direncanakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bareng dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam hal ini, pada Tahun 2024, Kecamatan Bareng menetapkan dua sasaran strategis yang masing-masing diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat tercapai secara optimal serta memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi program dan kebijakan di tingkat kecamatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bareng tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi yang dicapai. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara perencanaan dan hasil aktual. Analisis terhadap perbandingan ini juga berfungsi sebagai dasar dalam mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan strategi ke depan.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input

baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bareng Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30	73,59	99,04%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05	8,16	101,37%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				100,21%

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Bareng 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Bareng Tahun 2024 telah berhasil dan melebihi target sebesar 100,21% dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi capaian kinerja Kecamatan Bareng dalam mencapai sasaran strategis terkait peningkatan akuntabilitas dan kinerja kecamatan menunjukkan bahwa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Nilai Evaluasi AKIP, memiliki target sebesar 74,30. Namun, realisasi yang dicapai adalah 73,59 atau setara dengan 99,04% dari target, sebagaimana tercantum dalam LHE SAKIP No.X.700/568/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap belum tercapainya target secara penuh adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran, yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan. Untuk mengatasi kendala tersebut serta menjaga dan meningkatkan kinerja, beberapa solusi telah diterapkan. Optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi langkah utama dengan memperbaiki pengelolaan anggaran dan menempatkan tenaga kerja secara lebih strategis. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pihak terkait dalam penilaian evaluasi AKIP juga dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program akuntabilitas kinerja.

2. Berdasarkan data yang disajikan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng menunjukkan pencapaian yang melampaui target. Dengan target awal sebesar 8,05, realisasi capaian berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 mencapai angka 8,16, atau setara dengan 101,37% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan Bareng serta apresiasi positif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan setempat. Namun, dalam mencapai hasil tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, di antaranya keterbatasan sumber daya, baik dari aspek personel, anggaran, maupun infrastruktur pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan, beberapa strategi telah diterapkan. Upaya penguatan manajemen sumber daya dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta perbaikan infrastruktur guna mendukung kelancaran operasional pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Bareng diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta mempertahankan capaian positif dalam indeks kualitas pelayanan publik.

Pencapaian kinerja tersebut sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan

informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bareng Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	100,21%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bareng Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Kegiatan: Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 laporan	5 laporan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
6			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
7	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	15 orang/ bulan	93,75%
8	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
9	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	22 paket	20 paket	90,91%
10	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
11	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	9 paket	9 paket	100%
12	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	30 paket	100%
13	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
14	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
15	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
16	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
17	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
18	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 unit	58 unit	100%
19	Kegiatan: Penyediaan	Terlaksananya	Persentase pemenuhan jasa	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah			
20	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100%
21	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%
22	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
23	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%
24	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
25	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	13 unit	13 unit	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi			
26	Program: Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	87,63	92,49%
27	Kegiatan : Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
28	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
29	Program: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
30			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
31	Kegiatan: Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%
32			Jumlah Rekomendasi	4 dokumen	4 dokumen	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
			Hasil Koordinasi Forkopimcam			
33	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	100 orang	100%
34	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
35	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
36	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	100 %	100%
37	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
38	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
40	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	100%
41	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 laporan	26 laporan	100%
42	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
44	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	100%
45	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga kemasyara katan	78 Lembaga kemasyarak atan	100%
	2. Peningkatan Efektifitas		Jumlah Laporan Peningkatan	4 Laporan	4 Laporan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Bareng 2024

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai target 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator kinerja telah terpenuhi secara optimal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program yang dijalankan serta kinerja aparatur yang maksimal dalam merealisasikan tujuan peningkatan kinerja. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa proses perencanaan dan implementasi program telah berlangsung sesuai dengan ekspektasi. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai landasan untuk merancang dan mengembangkan inisiatif serupa di masa depan guna menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa seluruh dokumen terkait telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan kualitas tata kelola administrasi dan keuangan di tingkat daerah, sekaligus mengindikasikan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola proses perencanaan dan penganggaran secara efektif. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa sistem perencanaan dan evaluasi kinerja telah berjalan secara optimal, mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
3. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah mencapai target 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh dokumen yang direncanakan telah tersusun sesuai ketentuan, yakni Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi dari pihak terkait dalam memenuhi persyaratan administratif yang menjadi dasar pengelolaan kegiatan perangkat daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan yang tersusun secara sistematis, perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas

dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan yang direncanakan, yaitu sebanyak lima dokumen, termasuk LKJIP 2023 serta laporan capaian kinerja triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024, telah tersusun dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi antarunit kerja di SKPD serta kemampuan dalam menyusun laporan yang akurat dan komprehensif mengenai capaian kinerja serta realisasi program yang dilaksanakan. Dengan adanya laporan-laporan ini, manajemen SKPD dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih sistematis serta mengambil keputusan berbasis data yang valid untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah mencapai target 100%, yang menunjukkan bahwa pencairan gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dilakukan tepat waktu sesuai perencanaan. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi serta keandalan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah, sekaligus menegaskan komitmen dalam menjamin kesejahteraan pegawai melalui pemenuhan kewajiban keuangan secara tepat waktu. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan efektivitas sistem administrasi serta keteraturan prosedur dalam pengelolaan keuangan di tingkat SKPD. Dengan pencapaian penuh ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi keuangan berperan signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan serta mendukung kelancaran operasional SKPD secara keseluruhan
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah memenuhi tujuannya secara optimal, sebagaimana dibuktikan oleh capaian 100% dalam realisasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi dalam penerapan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan tingkat akurasi serta kualitas tinggi dalam pengelolaan keuangan di tingkat perangkat daerah. Dengan efektivitas dan efisiensi yang telah dicapai, administrasi keuangan perangkat daerah berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik
7. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 93,75%.

Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh adanya dua jabatan struktural yang masih belum terisi, yaitu Kasi Sosbud yang telah memasuki masa purna tugas sejak November 2023 serta Kasubag Umum dan Kepegawaian yang purna tugas sejak April 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengisian jabatan struktural yang dapat berdampak pada alokasi anggaran gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, percepatan pengisian posisi yang kosong menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan ASN ke depannya

8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mencapai target 100%, menandakan bahwa seluruh proses yang direncanakan, termasuk penyusunan 12 dokumen, telah terlaksana sesuai ketentuan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan di tingkat SKPD, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan pencapaian penuh ini, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini berkontribusi positif dalam menjaga keteraturan serta kredibilitas keuangan SKPD, sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat dan terpercaya
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mencapai target 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh proses koordinasi dan penyusunan laporan telah berjalan sesuai rencana, dengan satu dokumen laporan keuangan tahunan yang tersusun. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen terhadap keteraturan dan kualitas dalam pelaporan keuangan di tingkat SKPD, serta kemampuan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan. Dengan pencapaian penuh ini, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini berperan penting dalam mendukung evaluasi kinerja keuangan SKPD serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah terealisasi sepenuhnya, dengan indikator kinerja menunjukkan capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh kebutuhan administrasi, termasuk pemenuhan seragam paten dan belanja pakaian olahraga, telah terpenuhi sesuai perencanaan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan administrasi kepegawaian di Kecamatan Bareng yang telah berjalan secara optimal. Ke depan, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan

pencapaian ini dengan terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan administrasi kepegawaian agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan

11. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 90,91%. Pengadaan pakaian dinas paten telah terlaksana sesuai rencana dengan capaian 100% (6 stel dari 6 stel), namun belanja pakaian olahraga hanya terealisasi 87,5% (14 stel dari 16 stel yang direncanakan). Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh perubahan jumlah pegawai, khususnya akibat masih kosongnya dua jabatan struktural—Kasi Sosial dan Budaya sejak November 2023 serta Kasubag Umum dan Kepegawaian sejak April 2024. Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan tetap tinggi, dengan penyebab deviasi yang dapat dijelaskan secara rasional. Ke depan, diperlukan penyesuaian dalam perencanaan pengadaan agar lebih selaras dengan dinamika kepegawaian, sehingga alokasi anggaran dapat lebih efisien. Selain itu, percepatan pengisian jabatan struktural yang kosong menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran operasional serta administrasi di lingkungan instansi
12. kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan administrasi perkantoran di Perangkat Daerah telah dipenuhi sepenuhnya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kualitas sistem administrasi yang efisien dan efektif, serta kemampuan untuk memastikan bahwa kegiatan administratif berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan presentase capaian 100%, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memberikan kontribusi positif dalam menjaga produktivitas dan efisiensi operasional, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan terorganisir.
13. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa semua komponen instalasi listrik dan penerangan yang diperlukan untuk bangunan kantor telah tersedia sepenuhnya, sesuai dengan yang direncanakan sebanyak 9 paket didasarkan pada estimasi belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur teknis, serta kemampuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di kantor tercukupi dengan baik dari segi kelistrikan dan pencahayaan. Dengan mencapai target penuh, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini memberikan kontribusi positif

dalam mendukung kelancaran operasional kantor dan kenyamanan lingkungan kerja bagi para pegawai.

14. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa semua peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan telah tersedia sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, mencapai jumlah sebanyak 30 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan alat tulis dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan belanja peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperlukan untuk mendukung operasional kantor. Dengan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja, serta mendukung kelancaran tugas-tugas administratif di kantor.
15. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai kantor telah terfasilitasi sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, mencapai jumlah sebanyak 1 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan penambah daya tahan tubuh. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan logistik kantor untuk memenuhi kebutuhan dasar para pegawai. Dengan tersedianya bahan logistik kantor secara memadai, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendukung produktivitas serta kenyamanan lingkungan kerja di kantor.
16. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan barang cetakan dan penggandaan telah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, mencapai jumlah sebanyak 2 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan cetak dan penggandaan. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam pengadaan materi cetak dan penggandaan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kantor. Dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan secara memadai, sub kegiatan ini mendukung kelancaran operasional kantor dan memastikan ketersediaan dokumen dan materi cetak yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif.

17. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, dengan satu jenis bahan bacaan tersedia. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam memastikan ketersediaan sumber informasi yang relevan dan terkini bagi pegawai, yang penting untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas-tugas yang diemban. Dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan profesionalisme dan kualitas kerja di lingkungan kantor.
18. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah terselenggara sesuai dengan yang direncanakan, dengan empat laporan hasil rapat yang dihasilkan.
19. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana aparatur telah terlaksana secara penuh, sesuai dengan yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam proses pengadaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran berbagai urusan pemerintahan daerah. Dengan presentase capaian 100%, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memastikan ketersediaan barang yang diperlukan bagi aparatur pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan efisien.
20. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana untuk gedung kantor atau bangunan lainnya telah terlaksana sepenuhnya, sesuai dengan yang direncanakan sebanyak 68 unit. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan fasilitas gedung kantor yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah. Dengan mencapai target penuh, dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang

memadai bagi karyawan dan pengguna layanan publik, serta mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

21. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan jasa penunjang untuk urusan pemerintahan daerah telah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, mencapai target 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan jasa penunjang yang diperlukan untuk mendukung berbagai aspek operasional pemerintah daerah. Dengan mencapai target penuh, kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan kelancaran berbagai urusan pemerintahan, baik dari segi administratif, teknis, maupun layanan publik, yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan efisien bagi masyarakat.
22. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa semua kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik telah terfasilitasi dengan baik, mencapai jumlah sebanyak 36 laporan pembayaran tagihan Telepon dan pembayaran tagihan Listrik kantor sesuai yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur penting yang mendukung keberlangsungan operasional pemerintah daerah, termasuk komunikasi yang lancar, pasokan air yang memadai, dan pasokan listrik yang stabil. Dengan pencapaian target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan bagi kelancaran berbagai aktivitas pemerintahan, serta mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
23. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa semua jenis pelayanan umum yang diperlukan telah tersedia dengan baik, dengan jumlah pemenuhan sebanyak 25 laporan sesuai yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam penyediaan layanan-layanan yang diperlukan untuk mendukung operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan ketersediaan layanan-layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan efisien.

24. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung urusan pemerintahan daerah telah terlaksana dengan baik, mencapai kondisi yang baik sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam manajemen pemeliharaan barang milik daerah, yang penting untuk menjaga kelancaran dan kualitas layanan publik serta operasional pemerintah daerah. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan keandalan dan ketersediaan aset-aset penting bagi pemerintah daerah, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.
25. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemeliharaan, pembayaran biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan untuk kendaraan dinas operasional atau lapangan telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, mencapai jumlah sebanyak 10 unit. Capaian ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan keandalan kendaraan dinas, yang penting untuk mendukung mobilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas lapangan atau operasional pemerintah daerah.
26. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkup Pemerintah Daerah Kecamatan Bareng telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, dengan jumlah sebanyak 2 unit. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur fisik yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang aman dan layak bagi penyelenggaraan pelayanan publik serta kenyamanan lingkungan kerja bagi pegawai pemerintah daerah.
27. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan

dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, mencapai jumlah sebanyak 13 unit. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam menjaga kondisi dan fungsionalitas sarana serta prasarana yang mendukung kegiatan pemerintahan. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja di gedung kantor atau bangunan lainnya, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

28. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 92,49%. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Bareng perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik seperti parkir, tempat bermain anak sebagai salah satu indikator penilaian PATEN..
29. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan telah terlaksana sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan seluruh pelayanan terpadu (PATEN) memenuhi persentase 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam menjalankan tugas koordinasi untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan publik terpenuhi secara komprehensif dan efisien di tingkat kecamatan. Dengan presentase capaian yang mencapai target penuh, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat koordinasi antarunit kerja di tingkat kecamatan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.
30. Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan telah meningkat sesuai dengan yang diharapkan, dengan empat laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan telah disusun sesuai target. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat lokal, yang berpotensi untuk memberikan

dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan mencapai target penuh, sub kegiatan ini telah berhasil dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, sehingga meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

31. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terbukti bahwa sasaran untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah tercapai secara optimal. Hal ini tergambar dari realisasi yang mencapai target 100% dalam indikator Persentase Penyelenggaraan Hari Besar Nasional atau Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan (PHBA) dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berhasil memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan secara menyeluruh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan transparan.
32. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terkonfirmasi bahwa sasaran untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi yang mencapai target 100% dalam indikator persentase rekomendasi dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi dan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Forum koordinasi setempat dengan cepat dan tepat, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara keseluruhan.
33. kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dapat dipastikan bahwa sasaran untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah telah tercapai secara efektif. Hal ini terbukti dari pencapaian target dalam indikator jumlah laporan pelaksanaan laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan telah tercapai 5 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan ketaatan dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan sesuai dengan penugasan yang diberikan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
34. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terkonfirmasi bahwa sasaran untuk melaksanakan urusan

pemerintahan sesuai dengan penugasan Kepala Daerah telah tercapai secara optimal. Hal ini tercermin dari realisasi yang memenuhi target 4 laporan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forkopimcam di Kecamatan Bareng. Capaian ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil koordinasi dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yang pada akhirnya memastikan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

35. Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dapat disimpulkan bahwa sasaran untuk melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa telah berhasil terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari realisasi yang mencapai target 100 orang didasarkan pada estimasi jumlah peserta yang hadir. Capaian ini menunjukkan kesuksesan dalam mencapai partisipasi yang diharapkan dari masyarakat dalam kegiatan pembinaan, serta menegaskan komitmen dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui program-program pembinaan yang terarah dan efektif.
36. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dapat disimpulkan bahwa sasaran untuk melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah tercapai secara optimal. Hal ini terbukti dari realisasi yang mencapai target 4 laporan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forkopimcam di Kecamatan Bareng dalam indikator jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam. Capaian ini menandakan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah dijalankan sesuai dengan yang diharapkan, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam koordinasi antarinstitusi di tingkat kecamatan.
37. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sasaran untuk meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum telah terlaksana secara optimal. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target 100% dalam indikator persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang berhasil dikoordinasikan ke instansi terkait. Capaian ini menandakan bahwa upaya koordinasi dalam menangani kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah serta kegiatan trantibum telah berjalan dengan efektif, memastikan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh.
38. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sasaran untuk melaksanakan koordinasi penerapan

dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah telah berhasil terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi yang mencapai target 100 % Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus pelanggaran peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum, memastikan bahwa penerapan hukum dan penegakan aturan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

39. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sasaran untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait telah terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari realisasi yang mencapai target 12 laporan dalam indikator jumlah laporan koordinasi/sinergi tersebut. Capaian ini menegaskan efektivitas dalam upaya kolaborasi antara instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
40. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah terlaksana secara optimal. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target 100% dengan indikator Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu. Capaian ini menunjukkan keterlibatan dan kedisiplinan desa-desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta menegaskan efektivitas program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat lokal.
41. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran untuk Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah berhasil terlaksana secara optimal. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap sejumlah 13 Desa . Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam menyediakan dukungan, memberikan rekomendasi, dan mengoordinasikan upaya-upaya pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, yang pada akhirnya memastikan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di tingkat desa.

42. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan sasaran Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa berhasil terlaksana dengan sukses. Hal ini terlihat dari realisasi yang mencapai target 26 laporan meliputi Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Capaian ini menegaskan efektivitas dalam memberikan dukungan dan bimbingan dalam hal administrasi tata pemerintahan desa, yang pada gilirannya memastikan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di tingkat desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
43. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah berhasil terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi yang mencapai target 100% dalam indikator Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran, serta menegaskan bahwa program pemberdayaan telah berhasil menghasilkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa dan kelurahan.
44. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sasaran untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa telah berhasil terlaksana dengan sukses. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target 26 lembaga atau badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang dibina. Capaian ini menunjukkan kesuksesan dalam memfasilitasi dan mendukung berbagai lembaga atau badan usaha yang bertujuan untuk memajukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, serta menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama antarlembaga dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
45. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sasaran untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa telah berhasil terlaksana dengan sukses. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target 13 Desa yang menyusun RKPDes. Capaian ini menunjukkan kesuksesan dalam memfasilitasi dan mendukung desa yang bertujuan untuk memajukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, serta menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama antarlembaga dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

46. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan sasaran Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah berhasil terlaksana dengan sukses. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai 78 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
47. Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, terbukti bahwa sasaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan telah terlaksana dengan sukses. Hal ini tercermin dari realisasi yang mencapai target 4 laporan kasi PMD setiap tribulan. Capaian ini menandakan bahwa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik, serta menegaskan komitmen untuk memberikan dampak yang positif dan nyata bagi masyarakat di tingkat kecamatan.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30	72,12	74,24	73,59
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05	6,719	8,02	8,16

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng*, terjadi fluktuasi capaian dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai AKIP tercatat sebesar 72,12, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,24. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, di mana capaian hanya mencapai 73,59, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 74,30.

Secara tren, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan nilai AKIP dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam akuntabilitas dan kinerja kecamatan. Namun, jika dibandingkan dengan

tahun 2023, terjadi penurunan capaian pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti efektivitas implementasi program, kendala administratif, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja instansi. Meskipun terjadi deviasi dari target, capaian tahun 2024 masih menunjukkan performa yang cukup baik dan mendekati angka yang diharapkan. Untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi penguatan perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi AKIP sebelumnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan konsisten di masa depan.

Berdasarkan indikator *Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng*, capaian kinerja menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IKPP tercatat sebesar 6,719, kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 menjadi 8,02. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 8,16, yang bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,05. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam kualitas layanan publik di Kecamatan Bareng, baik dari segi efisiensi, transparansi, maupun kepuasan masyarakat. Lonjakan signifikan dari tahun 2022 ke 2023 menandakan adanya reformasi atau inovasi dalam sistem pelayanan, yang kemudian berhasil dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2024. Keberhasilan melampaui target tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi peningkatan layanan telah berjalan dengan baik, mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem pelayanan yang lebih responsif, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung. Namun, untuk memastikan tren ini terus berlanjut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor keberhasilan serta identifikasi potensi area perbaikan. Fokus ke depan dapat diarahkan pada digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengaduan dan masukan dari masyarakat guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan pencapaian ini, Kecamatan Bareng telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dan diharapkan tren positif ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Program

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022							
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	n/a	n/a
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	n/a	100%	n/a	n/a
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	n/a	2 dokumen	n/a	n/a
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	n/a	5 laporan	n/a	n/a
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	n/a	n/a
6			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	n/a	100%	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
7	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Bareng yang difasilitasi	n/a	14 bulan	n/a	n/a
8	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	n/a	12 kali	n/a	n/a
9	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	n/a	1 dokumen	n/a	n/a
10	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	n/a	n/a
11	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi.	n/a	16 stel	n/a	n/a
12	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	100%	n/a	n/a
13	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	n/a	3 Jenis	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
14	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	n/a	5 jenis	n/a	n/a
15	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	n/a	11 bulan	n/a	n/a
16	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	n/a	20 buku	n/a	n/a
17			Jumlah pemenuhan barang penggandaan		5000 lembar		
18	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	n/a	1 jenis	n/a	n/a
19	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	4 kali	n/a	n/a
20	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	n/a	100%	n/a	n/a
21	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	n/a	3 unit	n/a	n/a
22	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	n/a	100%	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
		Pemerintahan Daerah					
23	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	n/a	12 bulan	n/a	n/a
24	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	n/a	2 jenis	n/a	n/a
25	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	n/a	100%	n/a	n/a
26	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	n/a	1 unit	n/a	n/a
27			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya		9 unit		
28	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	n/a	2 unit	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
29	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	n/a	16 unit	n/a	n/a
30	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	n/a	100%	n/a	n/a
33	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	n/a	100%	n/a	n/a
34			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	n/a	100%	n/a	n/a
35	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	n/a	n/a
36			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
37	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	n/a	1 laporan	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
38		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	n/a	4 laporan	n/a	n/a
39	Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	n/a	1 kegiatan	n/a	n/a
40	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	n/a	4 laporan	n/a	n/a
41	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	n/a	n/a	n/a	n/a
42	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	n/a	12 laporan	n/a	n/a
43	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	n/a	12 kegiatan	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Trantibum yang dilaksanakan				
44	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	n/a	100%	n/a	n/a
45			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
46	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	n/a	26 dokumen	n/a	n/a
47	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemeritahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	n/a	26 laporan	n/a	n/a
48	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	n/a	100%	n/a	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
49			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	100%	n/a	n/a
50	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tersedianya Laporan Pengajuan RAPBDes /Perubahan APBDesa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	n/a	26 dokumen	n/a	n/a
51		Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	n/a	13 lembaga	n/a	n/a
52	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	n/a	26 dokumen	n/a	n/a
53			Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	n/a	13 Bumdes	n/a	n/a
54			Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	n/a	13 TP PKK	n/a	n/a
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023							
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	n/a	100%	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	n/a	n/a	100%	n/a
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	3 dokumen	n/a
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	5 laporan	n/a
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	100%	n/a
6			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	n/a	n/a	100%	n/a
7	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	16 orang/ bulan	n/a
8	2. Pelaksanaan penatausahaan dan	Terlaksananya penatausahaan dan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan	n/a	n/a	12 dokumen	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD				
9	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	1 dokumen	n/a
10	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	n/a	100%	n/a
13	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	n/a	n/a	10 paket	n/a
14	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	23 paket	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
15	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 Paket	n/a
16	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	2 Paket	n/a
17	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	1 Dokumen	n/a
18	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	4 laporan	n/a
19	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	n/a	n/a	100%	n/a
20	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	12 Unit	n/a
21	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	n/a	n/a	100%	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
22	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	36 laporan	n/a
23	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	25 laporan	n/a
24	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	n/a	n/a	100%	n/a
25	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	10 unit	n/a
26	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n/a	n/a	2 unit	n/a
27	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n/a	n/a	16 unit	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
28	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	n/a	n/a	94,69	n/a
29	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	n/a	n/a	100%	n/a
30	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	12 laporan	n/a
31	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	n/a	100%	n/a
32			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a
33	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	n/a	1 laporan	n/a
34			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	n/a	n/a	4 dokumen	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
35	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	n/a	n/a	100 orang	n/a
36	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	n/a	4 laporan	n/a
37	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	n/a	n/a	100%	n/a
38	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	n/a	n/a	12 kegiatan	n/a
39	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	n/a	n/a	12 laporan	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
40	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	n/a	n/a	100%	n/a
41			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a
42	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	n/a	n/a	26 dokumen	n/a
43	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	n/a	n/a	26 dokumen	n/a
44	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	n/a	n/a	100%	n/a
45			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	n/a	26 lembaga	n/a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
46	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	n/a	n/a	26 lembaga	n/a
47	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	4 dokumen	n/a
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024							
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	n/a	100%
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	n/a	100%
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	n/a	n/a	2 dokumen
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 laporan	n/a	n/a	5 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
		Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
6			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	n/a	100%
7	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	n/a	n/a	15 orang/ bulan
8	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	12 dokumen
9	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	n/a	n/a	1 dokumen
10	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	n/a	n/a	100%
11	Sub Kegiatan :	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	22 paket	n/a	n/a	20 paket

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						
12	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	n/a	100%
13	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	9 paket	n/a	n/a	9 paket
14	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	n/a	n/a	30 paket
15	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	n/a	n/a	1 Paket
16	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	n/a	n/a	2 Paket
17	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen
18	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
19	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	n/a	n/a	100%
20	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 unit	n/a	n/a	58 unit
21	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	n/a	n/a	100%
22	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	n/a	n/a	36 laporan
23	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	n/a	n/a	25 laporan
24	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	n/a	n/a	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan pemerintahan Daerah					
25	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	n/a	n/a	10 unit
24	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	n/a	n/a	2 unit
25	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	n/a	n/a	13 unit
26	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	n/a	n/a	87,63
27	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	n/a	n/a	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan					
28	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	12 laporan
29	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	n/a	n/a	100%
30			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
31	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	n/a	n/a	5 laporan
32			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	n/a	n/a	4 dokumen
33	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	n/a	n/a	100 orang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
34	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan
35	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	n/a	n/a	100%
36	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	n/a	n/a	100 %
37	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
38	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	n/a	n/a	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
39	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	n/a	n/a	13 Desa
40	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemeritahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 laporan	n/a	n/a	26 laporan
41	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	n/a	n/a	100%
42	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	n/a	n/a	26 lembaga
43			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	n/a	n/a	13 Desa
44	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga kemasyarakan	n/a	n/a	78 Lembaga kemasyarakatan
45	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	4 Laporan	n/a	n/a	4 Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI		
					2022	2023	2024
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	73,50	71,59	100,12%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	6,80	8,05	120%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				110,06%

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Bareng 2024 dan Renstra 2024 - 2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator *Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng*, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024–2026 telah tercapai dengan baik. Dengan target 73,50, realisasi tahun 2024 mencapai 73,59, yang berarti tingkat kemajuan telah mencapai 100,12%.

Capaian ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi berjalan sesuai perencanaan, dengan berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program kerja. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi telah berjalan secara efektif, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Meskipun target telah tercapai, selisih capaian dengan target relatif kecil, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Optimalisasi Perencanaan Kinerja – Memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan lebih terarah dan berbasis

pada evaluasi capaian sebelumnya

- b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran – Memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
- c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) – Meningkatkan sistem pelaporan kinerja berbasis data untuk mempermudah evaluasi serta identifikasi kendala yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM – Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur kecamatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar semakin profesional dan akuntabel.
- e. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Kinerja – Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pelayanan publik, sehingga mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi.

Dengan pencapaian yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra 2024–2026, Kecamatan Bareng perlu mempertahankan tren positif ini serta berupaya untuk meningkatkan capaian lebih tinggi guna memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

2. Berdasarkan indikator *Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng*, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024–2026. Dengan target 6,80, realisasi tahun 2024 mencapai 8,16, yang berarti tingkat kemajuan telah mencapai 120% dari target yang direncanakan.

Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang sangat signifikan dan melampaui ekspektasi perencanaan strategis. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, inovasi layanan berbasis teknologi, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan kemungkinan juga turut berkontribusi terhadap tingginya capaian ini.

Dengan pencapaian yang sudah melampaui target jangka menengah,

tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam peningkatan kualitas layanan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup:

- a. Evaluasi dan Penguatan Standar Pelayanan – Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang telah dicapai melalui penyempurnaan prosedur pelayanan dan pengawasan berkala.
- b. Pemanfaatan Teknologi Digital – Meningkatkan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pelayanan serta memudahkan akses masyarakat.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM – Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur kecamatan agar semakin profesional dan mampu menghadapi tantangan layanan publik di masa depan.
- d. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat – Memastikan adanya mekanisme feedback yang efektif untuk terus memperbaiki kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Bareng tidak hanya dapat mempertahankan capaian ini, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan publik hingga mencapai standar yang lebih tinggi dari yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra 2024–2026.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,5	87,63	102,49%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN					100,36%

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Bareng 2024 dan Renstra 2024-2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota dengan indikator *Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur*, realisasi tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, dapat disimpulkan bahwa program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* telah berjalan secara optimal sesuai perencanaan. Capaian ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja aparatur telah terjaga dengan baik, didukung oleh berbagai faktor seperti kedisiplinan pegawai, efektivitas sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi pemerintahan. Konsistensi dalam pencapaian target ini juga menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meskipun target telah tercapai, penting untuk memastikan bahwa kualitas kinerja aparatur tidak hanya bertahan di angka 100%, tetapi juga terus mengalami peningkatan dalam aspek efektivitas dan efisiensi kerja.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator *Nilai Paten Kecamatan*, capaian tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026. Dengan target sebesar 85,5, realisasi tahun 2024 mencapai 87,63, yang berarti tingkat kemajuan telah mencapai 102,49% dari target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Bareng

telah mengalami peningkatan yang signifikan, melampaui ekspektasi perencanaan strategis. Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi mekanisme layanan, percepatan proses administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur.
- b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan yang memungkinkan sistem kerja lebih efektif dan efisien, sehingga mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang lebih akuntabel.

Meskipun capaian ini sudah melampaui target, tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan dan peningkatan lebih lanjut dalam aspek kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi :

- a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik – Mengembangkan layanan berbasis digital dan mempercepat penerapan *e-government* guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur – Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat – Mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kualitas layanan secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) – Memastikan adanya pengawasan berkala terhadap indikator kinerja agar pencapaian tetap konsisten dengan standar yang lebih tinggi
- e. Inovasi dan Best Practices – Mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertahankan keunggulan kinerja

Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Bareng dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memastikan kepuasan masyarakat, serta mempertahankan posisi sebagai kecamatan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator *Persentase PHBN/PHBA dan Monitoring Evaluasi (Monev) Sosial Budaya yang Dilaksanakan*, capaian tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Bareng telah berjalan secara optimal sesuai perencanaan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Agama (PHBA), serta kegiatan monitoring dan evaluasi sosial budaya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator *Persentase Rekomendasi Forkopimcam yang Ditindaklanjuti*, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) telah ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme koordinasi dan sinergi antar unsur pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan dengan baik, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti tanpa kendala berarti. Keberhasilan ini juga mencerminkan tingginya komitmen dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Bareng.
5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator *Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang Dikoordinasikan ke Instansi Terkait*, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bareng telah berhasil dikoordinasikan dengan instansi terkait secara optimal. Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme koordinasi dan respons terhadap pelanggaran ketertiban umum di Kecamatan Bareng telah berjalan dengan baik. Kesigapan dalam menangani laporan pelanggaran Peraturan

Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta ketertiban umum menunjukkan efektivitas kerja sama antara kecamatan dan instansi berwenang, seperti Satpol PP, kepolisian, serta pihak terkait lainnya.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator *Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif*, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Bareng telah memiliki perencanaan pembangunan yang berjalan serta lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pengembangan desa. Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan telah berjalan optimal. Aktivitas lembaga pemberdayaan masyarakat yang stabil menandakan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemandirian desa dan penguatan ekonomi lokal.
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator *Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu*, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bareng telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan realisasi APB Desa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi dari pemerintah desa terhadap regulasi keuangan desa, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Ketepatan waktu dalam pelaporan realisasi APB Desa menjadi indikator penting dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja level nasional/internasional

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja level nasional/internasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	73,59	72,33	84,19	64,23

dan Kinerja Kecamatan					
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,16	8,45	9,11	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bareng terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bareng tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,59, yang lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Jombang sebesar 72,33. Dengan selisih keunggulan sebesar 1,26 poin, Kecamatan Bareng menunjukkan performa yang lebih baik dalam aspek akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan capaian di tingkat kabupaten. Kinerja ini mencerminkan bahwa Kecamatan Bareng telah memiliki sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan rata-rata OPD lain di Kabupaten Jombang.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,16. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Kabupaten Jombang yang berada di angka 8,45, maka capaian Kecamatan Bareng masih berada di bawah rata-rata kabupaten sebesar 0,29 poin.

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bareng terhadap realisasi kinerja di level Provinsi sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bareng tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,59, yang masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 84,19. Dengan selisih defisit sebesar 10,6 poin, capaian ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja Kecamatan Bareng masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan standar provinsi.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,16. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,11, maka capaian Kecamatan Bareng masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,95 poin

Sedangkan Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bareng terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bareng tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,59, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 64,23. Dengan selisih keunggulan sebesar 9,36 poin, Kecamatan Bareng berhasil melampaui standar nasional dalam aspek akuntabilitas kinerja pemerintahan. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Bareng memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang lebih efektif dibandingkan banyak kecamatan lain di Indonesia. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas manajemen kinerja, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.
2. Pada tahun 2024, Kecamatan Bareng berhasil mencapai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) sebesar 8,16. Namun, hingga saat ini, data mengenai rata-rata capaian IKPP nasional untuk tahun 2024 belum tersedia secara resmi.

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi Program dengan Realisasi kinerja level Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Program	Indikator Program	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,63	86,02	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi dan Nasional

Dari Tabel Perbandingan realisasi Program tahun ini dengan Realisasi kinerja level Kabupaten dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur tahun 2024 sebesar 100%, sejajar dengan capaian rata-rata Kabupaten Jombang yang juga mencapai 100%. Hal

ini mencerminkan kinerja aparatur yang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ke depan, upaya peningkatan melalui penguatan kompetensi, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur di Kecamatan Bareng.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indikator Nilai Paten Kecamatan Bareng mencapai 87,63, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang yang berada di angka 86,02. Nilai ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Bareng telah berada pada tingkat yang sangat baik dan melampaui rata-rata kabupaten. Dengan selisih 1,61 poin di atas rata-rata kabupaten, Kecamatan Bareng menunjukkan keunggulan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ke depan, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pada tahun 2024, indikator Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan. Dengan capaian 100% dalam pelaksanaan PHBN, PHBA, dan monev sosial budaya, Kecamatan Bareng telah menunjukkan kinerja yang optimal dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Ke depan, peningkatan kualitas pelaksanaan dapat difokuskan pada inovasi, digitalisasi, serta penguatan evaluasi untuk memastikan kegiatan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian 100% realisasi rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti di Kecamatan Bareng menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Ke depan, fokus utama adalah meningkatkan efektivitas dan dampak dari rekomendasi yang diberikan, serta memperkuat sinergi dan inovasi dalam sistem pemantauan serta pelaksanaan rekomendasi Forkopimcam.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus pelanggaran yang terjadi di

wilayah Kecamatan Bareng telah ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan dinas terkait lainnya. Capaian Kecamatan Bareng ini setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang yang juga mencapai 100%, menandakan bahwa koordinasi dalam penanganan pelanggaran hukum dan ketertiban umum telah berjalan efektif di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian 100% dalam perencanaan pembangunan desa dan keberfungsian LPM di Kecamatan Bareng menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa telah berjalan optimal dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Ke depan, fokus utama adalah memastikan kualitas implementasi perencanaan pembangunan, meningkatkan kapasitas SDM desa, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi agar pembangunan desa semakin efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian 100% dalam pelaporan realisasi APB Desa tepat waktu di Kecamatan Bareng menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Fokus ke depan adalah meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat pengawasan internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, Kecamatan Bareng berhasil mencapai target sasaran strategis dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,21%. Dengan kata lain, kinerja kecamatan tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja.

3.1.5.1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan peran penting kecamatan dalam pemerintahan dan

pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan ini telah mendorong berbagai perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan mendasar adalah pergeseran kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan, yang sebelumnya berstatus sebagai perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, kini menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, serta sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), penerapan kebijakan ini dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, sehingga kecamatan dapat lebih optimal dalam memberikan layanan administrasi.
- c. Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
- d. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang berperan dalam mendorong penerapan SAKIP. Regulasi ini menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sejalan dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- e. Dukungan dan komitmen dari Camat Bareng, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa, serta berbagai stakeholder lainnya berperan penting dalam pencapaian target pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Bareng. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program serta mencapai tujuan organisasi secara optimal.

3.1.5.2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan seperti arena bermain anak, tempat parkir dll
- b. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- d. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes.
- e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan.

3.1.5.3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
- b. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
- d. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- e. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3.1.6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Bareng menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	2.427.729.885	89,32	Sangat Menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	3.753.150	98,92	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	2.994.800	99,61	Sangat Menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	758.350	96,29	Sangat Menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	2.051.498.991	88,44	Sangat Menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%			Sangat Menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	93,75%	1.974.870.391	88,05	Sangat Menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifik	12 dokumen	100%	75.678.000	100,00	Sangat Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
	asi keuangan SKPD					
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	100%	950.600	98,75	Sangat Menunjang
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	100%	10.200.000	89,47	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	20 paket	90,91%	10.200.000	89,47	Sangat Menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	92.356.094	92,46	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	9 paket	100%	3.328.400	99,40	Sangat Menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	100%	15.008.500	99,70	Sangat Menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100%	48.857.500	87,61	Sangat Menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100%	4.847.800	99,60	Sangat Menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100%	1.800.000	76,53	Sangat Menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	18.513.894	99,99	Sangat Menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan	100%	100%	103.395.000	94,07	Sangat Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
penunjang urusan pemerintah Daerah	prasarana aparatur					
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 unit	100%	103.395.000	94,07	Sangat Menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	86.797.203	94,32	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	100%	35.248.507	89,01	Sangat Menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	51.548.696	98,34	Sangat Menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	79.729.447	97,92	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	100%	43.239.947	96,30	Sangat Menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	100%	27.769.500	99,91	Sangat Menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	100%	8.720.000	99,89	Sangat Menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,63	92,49%	6.433.250	98,30	Sangat Menunjang
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase pelayanan terpadu (PATEN)	100%	100%	6.433.250	98,30	Sangat Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	yang sesuai standar					
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	6.433.250	98,30	Sangat Menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	71.386.900	98,24	Sangat Menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%			Sangat Menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	100%	71.386.900	98,24	Sangat Menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100%			Sangat Menunjang
Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	100%	25.510.000	99,84	Sangat Menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	100%	45.876.900	97,37	Sangat Menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	28.302.800	98,84	Sangat Menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	100%	28.302.800	98,84	Sangat Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
	yang dikoordinasikan dengan instansi terkait					
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100%	28.302.800	98,84	Sangat Menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	15.553.200	98,14	Sangat Menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	100%	15.553.200	98,14	Sangat Menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 laporan	100%	15.553.200	98,14	Sangat Menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	34.629.800	97,57	Sangat Menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	100%	34.629.800	97,57	Sangat Menunjang
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	100%			Sangat Menunjang
Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	78 Lembaga kemasyarakatan	100%	15.245.000	99,77	Sangat Menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan di Desa					
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100%	19.384.800	95,91	Sangat Menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 1 program yang tidak dapat mencapai target kinerja yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Paten Kecamatan yang ditargetkan 94,75 hanya tercapai 87,63 dengan tingkat capaian 92,49. Adapun faktor yang menghambat pencapaian target nilai Paten Kecamatan Bareng adalah :

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih belum terpenuhi, seperti area parkir khusus bagi layanan, fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta ruang pelayanan yang lebih luas untuk kenyamanan masyarakat
2. Sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas pelayanan belum diterapkan secara optimal, sehingga upaya peningkatan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat masih perlu diperkuat
3. Jumlah petugas pelayanan yang terbatas berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian layanan, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator program adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, serta dukungan kepada aparatur berperan penting dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap pelayanan PATEN oleh tim PATEN Kabupaten mendorong kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang ditetapkan

3. Dukungan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kecamatan, Polsek, Koramil, serta dinas/instansi terkait, berperan penting dalam penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI agar berlangsung sukses dan meriah
4. Dukungan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kecamatan, Polsek, Koramil, serta dinas/instansi terkait, berperan penting dalam penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI agar berlangsung sukses dan meriah
5. Kerja sama antara tiga pilar—Kecamatan, Polsek, dan Koramil—berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Koordinasi yang aktif dalam memantau serta melaporkan gangguan keamanan memastikan lingkungan tetap kondusif dan terkendali
6. Pembinaan dan pengawasan rutin serta berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan memastikan bahwa penyusunan APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Pembinaan rutin dan evaluasi berkala oleh Tim Kecamatan dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan desa berjalan sesuai target serta memperkuat peran lembaga pemberdayaan masyarakat di desa

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bareng Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Bareng mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.876.885.603 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.2.584.035.835 atau serapan dana APBD mencapai 89,82% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp.292.849.768 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	2.717.989.953	89,32
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	158.895.650	98,37
TOTAL			2.876.885.603	89,82

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30	73,59	99,04	2.717.989.953	2.427.729.885	89,32
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05	8,16	101,37	158.895.650	156.305.950	98,37
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					100,21	2.876.885.603	2.584.035.835	89,82

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 89,32% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,21% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 10,89%. Tabel diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,04% dengan penyerapan anggaran mencapai 89,32%,

menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,72%. Namun, dalam pencapaian target kinerja, Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. Beberapa hambatan yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

1. Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan yang berbasis pada pemecahan masalah nyata serta minimnya kesadaran akan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng
 2. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum dijadikan pertimbangan utama dalam perencanaan periode berikutnya. Selain itu, dalam pengukuran kinerja individu, capaian kinerja belum sepenuhnya diperhitungkan sebagai faktor evaluasi
 3. Belum semua pegawai memahami bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai melalui inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau penyedia layanan
 4. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja
- b. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng dari target 8,05 telah tercapai 8,16 dapat dikatakan berhasil dengan capaian 101,37%, sedangkan realisasi anggaran 98,37%. Dengan efisiensi anggaran 3%

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Bareng tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BARENG TAHUN 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.717.989.953	2.427.729.885	89,32
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	87,63	92,49%	6.544.350	6.433.250	98,30
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	72.664.350	71.386.900	98,24

	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	28.348.050	28.302.800	99,84
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	35.490.700	34.629.800	97,57
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	15.848.200	15.553.200	98,14
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				98,93	2.876.885.603	2.584.035.835	89,82

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Bareng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026 Kecamatan Bareng yakni: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

3.2.2.1. Analisis dan efisiensi Penggunaan Anggaran

Di Kecamatan Bareng, analisis dan efisiensi penggunaan anggaran memainkan peran krusial dalam mengelola sumber daya keuangan yang terbatas agar dapat mencapai hasil yang optimal. Analisis penggunaan anggaran mencakup proses peninjauan dan evaluasi terhadap alokasi dana yang telah direncanakan serta penggunaannya dalam berbagai program dan kegiatan kecamatan. Sementara itu, efisiensi penggunaan anggaran berfokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang maksimal dengan biaya

seminimal mungkin.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Bareng, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan capaian kinerja yang telah terealisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	99,04	89,32	9,72
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	101,37	98,37	3
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			100,21	89,82	1,39

1. Kecamatan Bareng berhasil mencapai Nilai Evaluasi AKIP sebesar 99,04%, mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Namun, persentase penyerapan anggaran hanya mencapai 89,32%, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,72%. Rendahnya penyerapan anggaran ini bukan disebabkan oleh ketidakefektifan pengelolaan anggaran, melainkan terjadi karena terdapat dua jabatan struktural yang masih belum terisi, yaitu Kasi Sosial Budaya yang purna tugas sejak November 2023 dan Kasubag Umum dan Kepegawaian yang purna tugas sejak April 2024.

Meskipun terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, pencapaian kinerja yang tetap tinggi menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Namun, kekosongan jabatan ini perlu segera diatasi agar tidak mengganggu efektivitas kerja organisasi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan keseimbangan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, Kecamatan Bareng perlu melakukan percepatan pengisian jabatan yang kosong serta memastikan alokasi anggaran pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, monitoring dan

evaluasi terhadap kebutuhan belanja pegawai perlu diperkuat guna mencegah potensi ketidakseimbangan anggaran di tahun mendatang

2. Kecamatan Bareng berhasil mencapai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) sebesar 101,37%, melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini juga diiringi dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, yaitu 98,37%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara optimal untuk mendukung perbaikan layanan publik. Dengan tingkat efisiensi sebesar 3%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam program pelayanan publik telah berjalan efektif dan proporsional terhadap hasil yang dicapai.

Rasio antara capaian kinerja yang melampaui target dengan penyerapan anggaran yang hampir maksimal menunjukkan bahwa alokasi sumber daya telah dimanfaatkan dengan baik tanpa pemborosan. Efisiensi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap sesuai dengan kebutuhan program, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Ke depan, Kecamatan Bareng dapat mempertahankan tren positif ini dengan terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik, mengoptimalkan digitalisasi layanan, serta memastikan efektivitas anggaran tetap terjaga guna memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat

3.2.2.2. Analisis dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Kecamatan Bareng merupakan aspek utama dalam mengevaluasi capaian kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis sumber daya manusia mencakup peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, penempatan, serta pemanfaatan tenaga kerja di kecamatan. Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya manusia berfokus pada optimalisasi pencapaian hasil dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara efektif dan efisien.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Kecamatan Bareng perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, evaluasi kualifikasi dan kesesuaian tenaga kerja dengan

tugas serta tanggung jawab yang diemban menjadi langkah krusial. Proses ini mencakup penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, produktivitas serta kontribusi individu dalam pencapaian tujuan organisasi juga menjadi faktor penting dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam upaya Kecamatan Bareng untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memastikan bahwa tenaga kerja dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat, kecamatan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30	73,59	99,04	18	6	33,33	65,71
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05	8,16	101,37	22	9	36,36	65,01
RATA - RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM				100,21%	40	14	35	65,21%

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	18	6	33,33	65,71
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75	87,63	92,49%	7	4	57,14	35,35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100	100	100	4	1	25	75
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100	100	7	2	28,57	71,43
Program Pemberdayaan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan	100	100	100	4	1	25	75

Masyarakat Desa dan Kelurahan	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif							
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100	100	7	4	57,14	42,86
RATA - RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM				98,93	40	14	35	65,21%

Dari tabel 3.15 dapat disimpulkan Kecamatan Bareng menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target strategis, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng mencapai 73,59 dengan tingkat pencapaian 99,04% dari target 74,30, sedangkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) mencapai 8,16, melampaui target dengan capaian 101,37%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) mencapai 100,21%, menandakan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal. Pencapaian ini diperoleh dengan keterbatasan tenaga kerja yang cukup signifikan. Dari total 40 kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), hanya tersedia 14 orang, sehingga rasio keterisian SDM hanya 35%. Secara lebih spesifik, untuk pencapaian AKIP hanya tersedia 6 dari 18 kebutuhan SDM (33,33%), dan untuk pelayanan publik hanya tersedia 9 dari 22 kebutuhan SDM (36,36%). Keterbatasan SDM ini berdampak pada tingkat efisiensi yang cukup tinggi, yaitu 65,71% pada AKIP dan 65,01% pada pelayanan publik, dengan rata-rata 65,21%. Tingginya efisiensi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pegawai jauh dari kebutuhan ideal, Kecamatan Bareng masih mampu mencapai target kinerja dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Namun, dalam jangka panjang, keterbatasan SDM dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM perlu segera dilakukan, baik melalui pengisian formasi yang kosong, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi teknologi dan sistem digitalisasi pelayanan. Dengan langkah-langkah ini, Kecamatan Bareng dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, sekaligus memastikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Dari tabel 3.16 dapat disimpulkan Kecamatan Bareng menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 98,93%. Hampir seluruh program yang dijalankan berhasil mencapai target 100%, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Hanya Nilai Paten Kecamatan dalam

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sedikit di bawah target, dengan capaian 92,49%. Keberhasilan ini dicapai meskipun Kecamatan Bareng menghadapi tantangan besar dalam keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dari total kebutuhan 40 SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), hanya tersedia 14 SDM, dengan rasio keterisian sebesar 35%. Beberapa program mengalami keterbatasan SDM yang cukup signifikan, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hanya memiliki 6 dari 18 kebutuhan SDM (33,33%), Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan keterisian 28,57%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang hanya memiliki 25% dari total kebutuhan SDM. Meskipun demikian, tingkat efisiensi SDM secara keseluruhan tetap tinggi, dengan rata-rata efisiensi mencapai 65,21%, menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengoptimalkan tenaga kerja yang tersedia. Namun, keterbatasan SDM dalam jangka panjang dapat menjadi tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Kecamatan Bareng untuk segera melakukan strategi penguatan SDM, baik melalui redistribusi tugas, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi digitalisasi layanan guna mengurangi beban kerja manual. Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Bareng dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

3.2.2.3. Analisis dan efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Analisis dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bareng merupakan aspek penting dalam menilai kualitas layanan serta pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sarana dan prasarana mencakup infrastruktur fisik maupun non-fisik yang mendukung berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik. Sementara itu, efisiensi penggunaan sarana dan prasarana menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia guna mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien

Untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, Kecamatan Bareng perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki. Evaluasi ini

mencakup pemeriksaan terhadap kondisi infrastruktur, tingkat penggunaan fasilitas, keandalan serta ketersediaan sarana, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, membandingkan capaian kinerja dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi pemanfaatannya

Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, berbagai faktor perlu diperhatikan, seperti tingkat pemanfaatan, biaya operasional, keandalan fasilitas, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga harus mencakup aspek kualitatif, seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan sejauh mana infrastruktur mendukung kelancaran pelayanan. Dengan demikian, analisis efisiensi tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kualitatif yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

Hambatan utama dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bareng dapat mencakup keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, kurangnya tenaga terampil dalam manajemen fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak, alokasi anggaran yang lebih optimal, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur. Dengan analisis yang menyeluruh dan strategi yang tepat, Kecamatan Bareng dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif

Tabel 3.17
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2	100
2	Station Wagon	1	1	100
3	Sepeda Motor	22	22	100
4	Lemari Kayu	9	9	100
5	Rak Kayu	2	2	100
6	Filing Cabinet Besi	7	7	100
7	Kontainer	2	2	100

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
8	CCTV - Camera Control Television System	1	1	100
9	Mesin Absensi	2	2	100
10	LCD Projector/Infocus	1	1	100
11	Mesin Antrian	1	1	100
12	Alat Kantor Lainnya	1	1	100
13	Kursi Kayu	3	3	100
14	Sice	1	1	100
15	Meja Rapat	3	7	43
16	Meja Resepsionis	1	1	100
17	Meja Tambahan	0	0	0
18	Meja 1/2 Biro	14	14	100
19	Sketsel	1	1	100
20	Kursi Rapat	35	55	64
21	Kursi Tamu	2	2	100
22	Kursi Putar	11	11	100
23	Kursi Biasa	1	1	100
24	Bangku Tunggu	2	2	100
25	Kursi Lipat	28	28	100
26	Sofa	1	1	100
27	Meubeleur lainnya	1	1	100
28	Jam Mekanis	1	1	100
29	Jam Elektronik	0	0	0
30	Mesin Pemotong Rumput	1	1	100
31	Lemari Es	1	2	50
32	A.C. Window	1	1	100
33	A.C. Split	8	10	80
34	Kipas Angin	9	9	100
35	Alat Pendingin lainnya	1	1	100
36	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	100
37	Televisi	5	6	83
38	Sound System	3	3	100
39	Microphone	1	1	100
40	Mimbar/Podium	1	1	100
41	Gordyin/Kray	0	0	0
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	0
43	Alat Pemadam/Portable	2	2	100
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	100
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0
48	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1	100
49	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	6	6	100
50	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	1	100
51	Microphone/Wireless MIC	1	1	100

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
52	Digital LED Running Text	1	1	100
53	Layar Film/Projector	1	1	100
54	Alat Studio Video Lainnya	1	1	100
55	Facsimile	1	1	100
56	Kursi Dorong	1	1	100
57	Meja Kerja	1	1	100
58	P.C Unit	3	4	75
59	Lap Top	11	12	92
60	Monitor	1	1	100
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	13	100
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	100
63	Peralatan Komputer lainnya	1	1	100
64	Peralatan Permainan lainnya	1	1	100
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	100
66	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
67	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	100
68	Pagar Permanen	1	1	100
69	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
70	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100
71	Water Dispenser		1	0
72	Tangga Lipat		1	0
73	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		1	0
74	Penghancur Kertas		1	0
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS		253	287	88,15

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2024			EFISIENSI SARANA PRASARANA
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,30	73,59	99,04	253	287	88,15	10,89
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,05	8,16	101,37	253	287	88,15	13,22
RATA – RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM				100,21%	253	287	88,15	12,06

Berdasarkan tabel 3.18 diatas Kecamatan Bareng menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 100,21%. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng mencapai 73,59 dari target 74,30 (99,04%), sedangkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) mencapai 8,16, melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 101,37%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam implementasi kebijakan akuntabilitas dan peningkatan kualitas layanan publik

Namun, pencapaian ini harus dicapai dengan sarana dan prasarana yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun 2024, ketersediaan sarana dan prasarana hanya mencapai 253 unit dari kebutuhan standar 287 unit, atau sebesar 88,15%. Hal ini berarti masih ada 11,85% kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, yang dapat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja kecamatan. Tingkat efisiensi sarana dan prasarana untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja kecamatan sebesar 10,89%, sedangkan untuk pelayanan publik sebesar 13,22%, dengan rata-rata efisiensi keseluruhan sebesar 12,06%.

Meskipun keterbatasan sarana dan prasarana tidak menghambat pencapaian target kinerja secara signifikan, dalam jangka panjang peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan kinerja yang optimal. Untuk itu, Kecamatan Bareng perlu menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan pemerintahan dan publik. Dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih optimal, diharapkan kinerja kecamatan dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja berdasarkan sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/568/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2023 s.d. Semester I tahun 2024, Kecamatan Bareng memperoleh nilai 73,59 dengan predikat BB (Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Penilaian Komponen AKIP Kecamatan Bareng

NO	KOMPONEN	BOBOT	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% CAPAIAN (BOBOT)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	13,46	24,25	88,00
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,82	15,00	22,02	81,62
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,18	13,91	8,53	92,33
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,75	-	18,75	74,63
TOTAL		100%			73,59	

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan upaya -upaya sebagai berikut:

1. Membuat dokumen Berita Acara Penetapan Target Kecamatan Bareng yang memuat perubahan target tahun 2024 dilengkapi dengan perubahan target pada DPA.
2. Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut dari capaian Target jangka menengah dalam Renstra yang telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Menambahkan klasifikasi predikat pada SK reward dan punishment sebagai dasar penilaian kinerja dan capaian / target kinerja sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan.
4. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja berupa upaya nyata atas rekomendasi tindaklanjut yang ada sehingga terdapat kesinambungan atas hasil rekomendasi tindaklanjut laporan kinerja dengan perencanaan kinerja tahun selanjutnya.
5. Memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan pada Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi dengan capaian nasional.

3.3.2 Hasil Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Berdasarkan SK Bupati Jombang No.100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang Tahun 2024, Kecamatan Bareng berhasil mencapai nilai IKPP sebesar 8,16. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 8,05, dengan persentase keberhasilan mencapai 101,37%.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{IKPP} = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$$

Dari 2 indikator pembentuk nilai IKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Bareng pada tahun 2024 mencapai 96,11 berdasarkan hasil survei IKM melalui aplikasi Sukma Santri. Penilaian ini mencakup lima jenis layanan utama, yaitu :
 - a. Fasilitasi KTP Elektronik
 - b. Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fasilitasi SKCK
 - d. Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)
 - e. Fasilitasi Surat Keterangan lainnya

Penilaian dilakukan berdasarkan sembilan unsur dalam **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** sesuai dengan **Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**. Adapun rincian capaian dari masing-masing unsur SKM adalah sebagai berikut :

Sukma Santri
Laporan Layanan Berdasarkan Unsur
 Periode 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024
 Kecamatan Bareng

Fasilitas KTP Elektronik

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	93.25	Sangat Baik
2	Prosedur	93.97	Sangat Baik
3	Waktu	93.82	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	97.13	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	93.68	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96.41	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	95.26	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	95.98	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	96.12	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	95.07	Sangat Baik

Fasilitas Kartu Keluarga (KK)

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	91.67	Sangat Baik
2	Prosedur	92.95	Sangat Baik
3	Waktu	90.38	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99.36	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	92.95	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96.15	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	92.95	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	92.95	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	93.59	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	93.66	Sangat Baik

Fasilitas SKCK

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	100	Sangat Baik
2	Prosedur	100	Sangat Baik
3	Waktu	100	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	100	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	100	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	100	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	100	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	100	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	100	Sangat Baik

Fasilitas Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	95.65	Sangat Baik
2	Prosedur	95.65	Sangat Baik
3	Waktu	93.48	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	97.83	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	95.65	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	95.65	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	95.65	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	95.65	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	94.57	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	95.53	Sangat Baik

Fasilitas Surat Keterangan Lainnya

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	95.83	Sangat Baik
2	Prosedur	95.83	Sangat Baik
3	Waktu	95.83	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	95.83	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	95.83	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	95.83	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	95.83	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	95.83	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	96.3	Sangat Baik

2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 11 September 2024 nilai IPP Kecamatan Bareng adalah 3,35, hasil penghitungan aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan	3,89	0,93	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat pelayanan harus dipublikasikan pada media elektronik dan non elektronik - Hasil SKM harus dipublikasikan pada media elektronik dan non elektronik
2	Profesional SDM	2,1	0,53	- Diupayakan untuk dapat menambah jam layanan diluar jam layanan rutin dan dipublikasikan
3	Sarana dan Prasarana	3,29	0,59	<ul style="list-style-type: none"> - Diupayakan untuk dapat menambah fasilitas pada area parkir - Diupayakan untuk dapat menambah fasilitas pada toilet pengguna layanan - Diupayakan untuk dapat menambah fasilitas pada kelompok rentan
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	2,7	0,3	- Data layanan publik HARUS di publikasikan secara rutin

5	Konsultasi dan Pengaduan	2,25	0,23	- Diupayakan untuk dapat menambah sarpras konsultasi dan pengaduan
6	Inovasi	3	0,36	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Mengunggah maklumat pelayanan di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta menempatkan maklumat pelayanan di ruang pelayanan dengan Banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah dibaca
- Mengunggah hasil penilaian SKM di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta menempatkan hasil penilaian SKM di ruang pelayanan dengan Banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah dibaca

b. Aspek Profesional SDM

- Mengupayakan menambah jam layanan diluar jam layanan rutin, serta mengunggahnya di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta mencetak dengan banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah di baca untuk di taruh di ruang pelayanan
- Untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur di Kecamatan Bareng, penerapan mekanisme reward dan punishment perlu dilakukan secara objektif dan berkelanjutan

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir untuk pengguna layanan

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Mempublikasikan data layanan publik secara rutin melalui di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL

3.20 : MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN		
1	PERENCANAAN KINERJA							
	1	Membuat dokumen Berita Acara Penetapan Target Kecamatan Bareng yang memuat perubahan taeket tahun 2024 dilengkapi dengan perubahan target pada DPA	1	Mengadakan rapat internal yang diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, sebagai acuan dalam menetapkan target untuk tahun 2025	1 Kegiatan	Tribulan 1	Camat	Sudah dilaksanakan
			2	Menyusun berita acara penetapan target yang akan di verifikasi oleh Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 dokumen	Tribulan 1	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
	2	Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut dari capaian Target jangka menengah dalam Renstra yang telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	1	Mengadakan rapat internal dengan seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, memantau serta menilai pencapaian target dalam renstra, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi	1 Kegiatan	Tribulan 1	Camat	Sudah dilaksanakan
			2	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, termasuk target sasaran, program, dan kegiatan yang tercantum dalam renstra	1 dokumen	Tribulan 1	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
2	PENGUKURAN KINERJA							

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN		
	1	Menambahkan klasifikasi predikat pada SK reward dan punishment sebagai dasar penilaian kinerja dan capaian / target kinerja sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan	1	Mengadakan rapat internal dengan seluruh pegawai untuk menyosialisasikan sistem pemberian reward dan punishment sebagai dasar dalam menilai kinerja serta pencapaian target	1 Kegiatan	Tribulan 1	Camat	Sudah dilaksanakan
			2	Menyusun pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Bareng dengan Kriteria Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang)	1 dokumen	Tribulan 1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah dilaksanakan
3	PELAPORAN KINERJA							
	1	Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja berupa upaya nyata atas rekomendasi tindaklanjut yang ada sehingga terdapat kesinambungan atas hasil rekomendasi tindaklanjut laporan kinerja dengan perencanaan kinerja tahun selanjutnya	1	Mengadakan rapat internal dengan seluruh pegawai dengan memperhatikan rekomendasi tindaklanjut laporan kinerja	1 Kegiatan	Tribulan 1	Camat	Sudah dilaksanakan
			2	Menyesuaikan dokumen perencanaan (rencana aksi, kkpt, pengukuran kinerja, iku dan iki) serta penyesuaian rencana penganggaran (RKA) sesuai dengan BA acara evaluasi kinerja	1 dokumen	Tribulan 1	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
	2 Memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan pada Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi dengan capaian nasional	1 Memperbaiki laporan kinerja dengan melakukan penambahan informasi mengenai capaian sasaran opd serta membandingkan realisasinya dengan capaian nasional	1 dokumen	Tribulan 1	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH					
	1 Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung dalam proses efektifitas dan efisiensi kinerja	1 Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja	1 Kegiatan	Tribulan 1	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bareng berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Bareng. Laporan kinerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Bareng

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas layanan publik” dengan capaian kinerja sebesar 101,4% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 74,30 **tidak mencapai target kinerja** tercapai 73,59 dengan tingkat capaian 99,04% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/568/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024
2. Nilai IKPP Kecamatan Bareng pada tahun 2024 8,05 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,16 dengan capaian 101,37%. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024

4.2 Saran

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2026 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bareng untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan rekomendasi Laporan hasil evaluasi SAKIP nomor:X.700/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam perencanaan kinerja agar mereka lebih memahami proses perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian kinerja organisasi.
 - b. Membuat dokumen Berita Acara Penetapan Target Kecamatan Bareng yang memuat perubahan target tahun 2024 dilengkapi dengan perubahan target pada DPA.
 - c. Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut dari capaian Target jangka menengah dalam Renstra yang telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
 - d. Menambahkan klasifikasi predikat pada SK reward dan punishment sebagai dasar penilaian kinerja dan capaian / target kinerja sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan.
 - e. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja berupa upaya nyata atas rekomendasi tindaklanjut yang ada sehingga terdapat kesinambungan atas hasil rekomendasi tindaklanjut laporan kinerja dengan perencanaan kinerja tahun selanjutnya
 - f. Memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan pada Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi dengan capaian nasional
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKPP Kecamatan Bareng pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
 1. Upaya Perbaikan Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik dan Permenpan No 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Perbaikan akan dilakukan pada unsur:

a. Waktu

Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan

b. Kompetensi petugas

- Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan
- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama

c. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

2. Upaya Perbaikan IPP Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 11 September 2024. Perbaikan akan dilakukan pada aspek :

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Mengunggah maklumat pelayanan di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta menempatkan maklumat pelayanan di ruang pelayanan dengan Banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah dibaca
- Mengunggah hasil penilaian SKM di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta menempatkan hasil penilaian SKM di ruang pelayanan dengan Banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah dibaca

b. Aspek Profesional SDM

- Mengupayakan menambah jam layanan diluar jam layanan rutin, serta mengunggahnya di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan serta mencetak dengan banner atau poster dengan desain yang jelas dan mudah di baca untuk di taruh di ruang pelayanan
- Untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur di Kecamatan Bareng, penerapan mekanisme reward dan punishment perlu dilakukan secara objektif dan berkelanjutan

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir untuk pengguna layanan

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Mempublikasikan data layanan publik secara rutin melalui di Facebook (FB), Instagram (IG) dan Website resmi kecamatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bareng disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja kecamatan kepada para pemangku kepentingan serta semua pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan.

Bareng, 10 Januari 2025

CAMAT BARENG



USMAN, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007 001